

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.<sup>1</sup>

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat dikatakan sebagai salah satu penyelamat kondisi perekonomian Indonesia karena mampu menyerap tenaga kerja pengangguran atau terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Selain itu, UMKM mampu bertahan di tengah goncangan krisis moneter yang melambungkan harga barang - barang kebutuhan rumah tangga. UMKM hadir sebagai salah satu jalan keluar bagi Indonesia untuk bangkit dari masa-masa krisis ekonomi. UMKM tumbuh sebagai jalan keluar yang berlandaskan ekonomi domestik, sementara itu pertumbuhan sektor ekonomi Indonesia pun sebagian besar didorong oleh ekonomi domestik.

---

<sup>1</sup> Sudarno, *Kontribusi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Di Depok*, dalam jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol 10, No.2, Desember 2011 : 139-146, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=144302&val=4030&title=KONTRIBUSI%20USAHA%20MIKRO,%20KECIL%20DAN%20MENENGAH%28UMKM%29%20DALAM%20PENYERAPAN%20TENAGA%20KERJA%20DI%20DEPOK>, diakses pada hari senin, 10 Februari 2016, pukul 16.30.

Perkembangan UMKM di Indonesia tahun 2012 sampai tahun 2013 mengalami peningkatan yang cukup baik. Berikut ini adalah Perkembangan UMKM pada akhir tahun 2013:

**Tabel 1.1 Perkembangan UMKM Indonesia 2012-2013**

No	Keterangan	Jumlah	
		2012	2013
1	Usaha Mikro	Rp 2.951.120,6	Rp 3.326.564,8
2	Usaha Kecil	Rp 798.122,2	Rp 876.385,3
3	Usaha Menengah	Rp 1.120.325,3	Rp 1.237.057,8

*Sumber : DataUMKM (diolah)*

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa berdasarkan PDB pada tahun 2013 lebih besar dibandingkan tahun 2012 yang menunjukkan usaha mikro tahun 2012 sebesar Rp 2.951.120,6 milyar dan tahun 2013 sebesar Rp 3.326.564,8 milyar yang selisihnya Rp 375.444,2 milyar. Usaha kecil tahun 2012 sebesar Rp 798.122,2 milyar dan tahun 2013 Rp 876.385,3 milyar yang selisihnya 78.263,1 milyar. Dan usaha menengah pada tahun 2012 Rp 1.120.325,3 milyar dan tahun 2013 Rp 1.237.057,8 milyar yang mempunyai selisih Rp 116.732,5 milyar.<sup>2</sup>

Dalam skala Jawa Timur, UMKM juga memiliki sumbangsih cukup besar untuk perkembangan perekonomian di Jawa Timur, dari data yang ada (data terlampir), jumlah usaha dari berbagai sektor yang dirangkum dari berbagai kabupaten dan kota sebesar 6.825.931 yang secara terperinci (Usaha

<sup>2</sup> <http://www.depkop.go.id/berita-informasi/data-informasi/data-umkm/>, diakses pada rabu, 01 Februari 2016 pada pukul 21.37 WIB

Mikro sebesar 6.533.694 atau 95,72%, Usaha Kecil 261.827 atau 3,84%, Usaha Menengah 30.410 atau 0,45%. Sedangkan jumlah tenaga kerja yang terlibat pada sektor UMKM Jawa Timur sebesar 11.117.439. Dari data yang ada, UMKM cukup memberikan manfaat yang luar biasa untuk sektor perekonomian, bahkan tidak dapat dianggap kecil, karena 95,72% dari UMKM di Jawa Timur diprakarsai oleh Usaha Mikro.

Begitu pula dengan salah satu kabupaten dan kota di Jawa Timur yaitu Blitar. Dalam struktur perekonomian Kabupaten Blitar, peranan ekonomi di luar pertanian (non pertanian) dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2014 mencapai sebesar 64,14 persen. Pada tahun 2014, total nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Blitar sebesar Rp. 24,13 Triliun, sedangkan total PDRB Provinsi Jawa Timur mencapai Rp.1.220,21 Triliun, atau dengan kata lain bahwa peranan perekonomian Kabupaten Blitar terhadap perekonomian Jawa timur sebesar 1,57 persen.<sup>3</sup>

Kemudian kondisi sektor – sektor usaha di daerah kabupaten blitar secara umumnya pada komoditi peternakan terbesar adalah ayam ras petelur dengan jumlah 14.886.500 ekor, populasi kedua adalah ayam buras dengan jumlah 2.283.400 ekor, populasi ketiga adalah ayam ras pedaging dengan

---

<sup>3</sup><http://blitarkab.bps.go.id/KegiatanLain/view/id/5>, diakses pada hari Rabu, 01 Februari 2016 pukul 20.33 WIB.

jumlah 948.900 ekor, selanjutnya populasi ke empat adalah itik dengan jumlah 798.700 dan yang terakhir adalah populasi entok dengan jumlah 79.780 ekor.<sup>4</sup>

Di Kabupaten Blitar, selain sektor peternakan juga ada sektor prioritas yaitu pertanian. Sektor pertanian di Kabupaten Blitar meliputi : tanaman pangan dan hortikultura, peternakan kehutanan dan perkebunan, dan perikanan. Sektor pertanian merupakan sektor prioritas terhadap nilai PDRB Kabupaten Blitar yang mencapai 47%. Di perkirakan pada beberapa dasawarsa kedepan sektor pertanian masih mendominasi di bandingkan dengan sektor lain mengingat kultur dan kondisi geografi di Kabupaten Blitar sangat mendukung perkembangan sektor pertanian.

Tidak dipungkiri bahwa kemajuan pembangunan ekonomi dan perdagangan telah mempengaruhi lahirnya institusi yang berperan dalam lalu lintas keuangan. Para pedagang dan pengusaha sudah tidak mungkin lagi mengurus keuangan secara sendiri.<sup>5</sup> Hal tersebut sudah menjelaskan, bahwa secara tidak langsung mereka telah membutuhkan adanya lembaga keuangan. Baik bank, non bank maupun lembaga keuangan yang lain khususnya yang berbasis syariah. Yang mana konsep organisasi atau lembaga keuangan tersebut, sesungguhnya sudah dikenal sejak sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Yakni lembaga *Baitul Maal* (rumah dana) atau yang sering disebut dengan BMT, yang merupakan lembaga bisnis dan sosial yang

---

<sup>4</sup> Rekap kabupaten/ Kota Populasi Ternak Per Wilayah (ekor) RKNK01, <http://disnak.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2015/08/Unggas.pdf>, diakses pada tanggal 02 Februari 2016 pukul 19.30 WIB.

<sup>5</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 51.

pertama kali dibangun oleh Nabi. Lembaga tersebut berfungsi sebagai tempat penyimpanan.<sup>6</sup>

*Baitul maal wattamwil* (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitut tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti : zakat, infaq dan shodaqoh. Sedangkan *baitut tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah. Secara kelembagaan BMT didampingi atau didukung Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). PINBUK sebagai lembaga primer karena mengemban misi yang lebih luas, yakni menetaskan usaha kecil.

Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun materi maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat<sup>7</sup>

BMT juga merupakan lembaga keuangan syariah yang secara kelembagaan sama dengan koperasi. Oleh karena itu, BMT operasionalnya tidak diawasi oleh Bank Indonesia. Fungsi BMT sama dengan bank, yaitu

---

<sup>6</sup> Ibid, hal. 56

<sup>7</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, ( Yogyakarta : Ekonisia, 2007 ), hal 96.

sebagai lembaga intermediasi bagi masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Perbedaan antara BMT dengan bank ada pada fasilitas yang diberikan, jika bank sebagai lembaga besar dapat memberikan fasilitas berupa transfer, kliring, inkaso dan lain sebagainya, sedangkan BMT tidak dapat melakukan hal demikian.

Seperti Bank Syariah, BMT juga memberikan jasa-jasa pembiayaan. Jasa-jasa yang terkait dengan jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT dikemas dalam produk-produk sama dengan yang ada dalam Bank Syariah, produk tersebut diantaranya adalah pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil (BBA)*. Pembiayaan *BBA* yaitu pembelian barang dengan cara dicicil atau angsuran. Prinsip *BBA* merupakan pengembangan dari *murabahah*, akan tetapi yang membedakan hanyalah cara pembayaran yang bersifat jangka panjang, pembayaran dengan angsuran dilakukan tiga bulan, enam bulan, atau satu tahun sesuai dengan kesepakatan pihak BMT dengan nasabah.<sup>8</sup>

Objek penelitian ini adalah BMT Agridama Blitar, dimana pembiayaan *BBA* merupakan pembiayaan yang cukup diminati oleh masyarakat karena pembiayaan ini cukup meringankan pelunasan pembiayaan yang dilakukan. Selain itu, apabila sebelum jatuh tempo nasabah sudah mampu melunasi pembiayaannya maka nasabah hanya akan membayar *margin* pada saat melunasinya.

---

<sup>8</sup> Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Yogyakarta: Ekosnia, 2003), hal 101.

**Tabel 1.2 Perkembangan Pembiayaan BBA di BMT Agridama  
Blitar (2013-2015)**

No	Tahun	Jumlah Pembiayaan
1	2013	Rp 433.731.000,-
2	2014	Rp 499.950.000,-
3	2015	Rp 795.183.500,-

*Sumber : Data Pembiayaan BBA (diolah)*

Tabel 1.2 menunjukkan pembiayaan BBA mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 sebesar Rp Rp 433.731.000,- lalu pada tahun 2014 meningkat sebesar Rp 499.950.000,- kemudian pada tahun 2015 sebesar Rp 795.183.500,-.

Berdasarkan pengertian diatas, BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh-kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Seperti halnya yang dilakukan oleh BMT Agridama Blitar produk pembiayaan yang sering digunakan yakni pembiayaan *BBA*. Pembiayaan *BBA* adalah suatu kontrak perjanjian oleh bank untuk membeli barang yang dikehendaki oleh si nasabah. Bank tersebut akan menjual barang yang dibelinya itu kepada nasabah tersebut dengan harga pokok dan keuntungan yang disepakati, dan si nasabah akan membayarnya secara tangguh, mengikuti masa tempo yang ditetapkan dan di bayar dengan jumlah tertentu secara berangsur-angsur.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Osman sabran, *Urus Niaga Al Bai' Bithaman Ajil Dalam Mekanisme Pembiayaan Tanpa Riba*, (Malaysia: UTM, 2000), hal 4.

Berdasarkan latar belakang di atas, pembiayaan BBA yang ada di BMT Agritama Blitar cukup diminati nasabah serta memiliki manfaat penting untuk pengembangan usaha mikro nasabah di BMT Agritama Blitar, oleh karenanya peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul ” **Peran Pembiayaan *Bai’ Bitsaman Ajil* Bagi Pengembangan Usaha Mikro Nasabah Di BMT Agritama Blitar** ”.

## **B. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada :

1. Bagaimana peran pembiayaan *bai’ bitsaman ajil* bagi pengembangan usaha mikro nasabah di BMT Agritama Blitar ?
2. Bagaimana perkembangan usaha nasabah sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan *bai’ bitsaman ajil* di BMT Agritama Blitar ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui peran pembiayaan *bai’ bitsaman ajil* bagi pengembangan usaha mikro nasabah Di BMT Agritama Blitar.
2. Untuk mengetahui perkembangan usaha nasabah sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan *bai’ bitsaman ajil* di BMT Agritama Blitar.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari adanya penelitian ini, hasil penelitian diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis adalah sebagai berikut:

##### 1. Kegunaan secara teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan tentang pembiayaan *bai' bitsaman ajil* bagi pengembangan usaha mikro nasabah.

##### 2. Kegunaan secara praktis

Secara praktis diharapkan dapat memberikan informasi yang bernilai bagi pengelola atau menjadi bahan acuan dalam memantau pengembangan usaha mikro yang dijalankan nasabah.

Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta dapat menjadi referensi tentang penelitian yang sejenis terkait pembiayaan *bai' bitsaman ajil* bagi pengembangan usaha mikro nasabah.

#### **E. Penegasan Istilah**

##### 1. Penegasan Konseptual dalam penelitian ini mencakup :

###### a. Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil*

Pembiayaan *bai' bitsaman ajil* adalah suatu kontrak perjanjian oleh bank untuk membeli barang yang dikehendaki oleh si nasabah. Bank tersebut akan menjual barang yang dibelinya itu kepada nasabah tersebut dengan harga pokok dan keuntungan yang disepakati, dan si

nasabah akan membayarnya secara tangguh, mengikuti masa tempo yang ditetapkan dan dibayar dengan jumlah tertentu secara berangsur-angsur.<sup>10</sup>

#### b. Pengembangan Usaha Mikro

Pengembangan adalah proses, cara, perbuatan mengembangkan : pemerintah selalu berusaha dulu, pembangunan secara bertahap dan teratur yang menjurus ke sasaran yang dikehendaki.<sup>11</sup>

Usaha mikro adalah seperti yang dicantumkan pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pasal 1 ayat 1 yaitu usaha produktif milik perorangan dan atau badan usaha perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.<sup>12</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Definisi Operasional merupakan definisi variabel secara operasional, secara praktik, secara riil, secara nyata dalam lingkup objek penelitian yang diteliti. Sedangkan menurut pendapat lain Definisi operasional adalah batasan pengertian yang dijadikan pedoman untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan, misalnya penelitian. Oleh karena itu, definisi ini

---

<sup>10</sup> Osman sabran, *Urus Niaga Al Bai' Bithaman...*, hal 4.

<sup>11</sup>Kamus Bahasa Indonesia Online,  
<http://kamusbahasaIndonesia.org/pengembangan/miripKamusBahasaIndonesia.org>, diakses pada  
 Senin. 01 Februari 2016 pukul 11.27 WIB.

<sup>12</sup> Yana Nur Faroida, *Korelasi Pembiayaan Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah Koperasi Muhammadiyah Kota Blitar*, ( Tulungagung : Skripsi Tidak terbitkan, 2015 ), hal 33 -35.

disebut juga definisi kerja karena dijadikan pedoman untuk melaksanakan suatu penelitian atau pekerjaan tertentu.<sup>13</sup>

Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* akad jual beli dimana pihak bank menjual barang yang telah dibeli kepada nasabah dengan diketahui harga pokok juga marginnya dan membayarnya secara tangguh sesuai yang telah disepakati dan dilakukan secara berangsur – angsur.

Pengembangan Usaha Mikro merupakan upaya untuk meningkatkan kegiatan ekonomi rakyat agar masyarakat dapat bertumbuh kembang dalam menjalankan usaha yang akan dijalankan atau sudah dijalankan.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan kemudahan dalam pembahasan dan pemahaman dari skripsi yang berjudul, “Peran Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* Bagi Pengembangan Usaha Mikro Nasabah Di BMT Agritama Blitar”, maka peneliti akan membuat sistematika penelitian untuk mempermudah pembahasan. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

**BAB I** :Pendahuluan

Merupakan konsep dasar yang memberikan gambaran secara keseluruhan penelitian ini, yang meliputi konteks penelitian/latar belakang masalah, fokus penelitian/rumusan masalah, tujuan

---

<sup>13</sup> Widjono *Bahasa Indonesia* Cet. 2, (Jakarta:PT Grasindo, 2007 ), hal 117-121.

penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

**BAB II : Kajian Pustaka**

Terdiri dari deskripsi teori, penelitian terdahulu, dan paradigma penelitian.

**BAB III : Metode Penelitian**

Terdiri dari rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisa data, pengecekan keabsahan temuan, tahap – tahap penelitian.

**BAB IV : Hasil Penelitian**

Terdiri dari deskripsi data, temuan data, analisis data.

**BAB V : Pembahasan**

**BAB VI : Penutup**

Terdiri dari kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran/rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan.